

SKRIPSI

**ANALISA MASALAH PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA
MASYARAKAT MISKIN DI DESA KOTARAJA KECAMATAN SIKUR KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN 2020**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh :

SONIA DWI PRASTITI
NIM.217130118

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISA MASALAH PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) PADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA KOTARAJA
KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020**



Disusun dan diajukan Oleh :

SONIA DWI PRASTITI
NIM:217130118

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi Mataram, 10 Agustus
2021

Pembimbing

Pembimbing I


Dedy Swanto, ST.,MM
NIDN.818087901

Pembimbing II


Inka Nusamuda Pratama, S.IP., M.I.P
NIDN.0824109206



**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**


Ayatullah Hadi, S.IP., M.I.P
NIDN.0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISA MASALAH PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) PADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA KOTARAJA
KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020**

Disusun dan diajukan Oleh :

SONIA DWI PRASTITI
NIM: 217130118

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 14 Agustus 2021 Dinyatakan
telah memenuhi persyaratan
Menyetujui

Tim Penguji

1. **Dedy Iswanto, ST.,MM**
NIDN.0818087901

(PU) (.....)

2. **Inka Nusamuda Pratama, S.IP., M.I.P**
NIDN.0824109206

(PP) (.....)

3. **Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si**
NIDN. 0815118302

(PN) (.....)

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801


PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 14 Agustus 2021

Mahasiswa




Sonia Dwi Prastiti
Nim.217130118



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONIA DWI PRASTITI
NIM : 217130118
Tempat/Tgl Lahir : Selong, 23 Agustus 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 087 743 318 535
Email : prastiti.sonia@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

ANALISA MASALAH PENYALURAN BANTUAN LANGRUNG TUNAI
(BLT) PADA MASYARAKAT MUSKIN DI DESA KOTARAJA
KECAMATAN SIKUR KAB. LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22 September 2021
Penulis



SONIA DWI PRASTITI
NIM. 217130118

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

Salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonia Dwi Prastiti
NIM : 217130118
Tempat/Tgl Lahir : Selong, 23 Agustus 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FUIPOL
No. Hp/Email : Prastitisonia@gmail.com
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

ANALISA MASALAH PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) PADA MASYARAKAT MUKIN DI DESA KOTARAJA
KECAMATAN SIKUR KAB. LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 September 2021

Penulis



SONIA DWI PRASTITI
NIM. 217130118

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

دَرَجَتِ تَوَالِ الْعِلْمِ أَوْ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَنْ لِّلَّهِ يَرْفَعُ

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Depag RI, 1989 : 421)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab skripsi yang berjudul “**Analisa Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020**”. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu pemerintahan (S. IP) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, termasuk dalam penulisan skripsi ini baik secara bahasa, penulisan dan materinya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata-katanya yang kurang dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kritik serta saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah pengetahuan dan referensi.

Mataram, 14 Agustus 2021

SONIA DWI PRASTITI
NIM. 217130118

ANALISA MASALAH PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA KOTARAJA KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

Sonia Dwi Prastiti ¹, Dedy Iswanto ², Inka Nusamuda Pratama ³
Mahasiswa ¹, Pembimbing Utama ², Pembimbing ³
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah kita untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Tingkat kesejahteraan di negara kita dianggap masih sangat kurang dikarenakan masih begitu banyak masyarakat yang memiliki kehidupan yang kurang layak yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Penanganan Kemiskinan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal-hal yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah untuk mendapatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, kepala urusan pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat, 4 kepala dusun, ketua karang taruna dan masyarakat. Setelah data terkumpul maka data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian maka dapat ditemukan bahwa Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Kotaraja kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur berjalan kurang baik secara umum hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang diberikan belum merata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut. Dalam hal pengawasan program ini belum berjalan dengan baik, kemudian belum adanya kerjasama antara berbagai pihak sehingga data yang didapatkan kadang berbeda dengan yang ada di lapangan. Hal ini membuat program ini berjalan tidak tepat sasaran.

Kata Kunci : Masalah, Penyaluran, Bantuan Langsung Tunai.

**ANALYSIS OF THE PROBLEM OF DISTRIBUTION OF CASH DIRECT
ASSISTANCE (BLT) TO THE POOR IN VILLAGE KOTARAJA, SIKUR
DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY IN 2020**

SONIA DWI PRASTITI
217130118

ABSTRACT

Direct Cash Assistance (BLT) is one of the actions taken by our government to provide subsidies to people in need in Indonesia. Because there are still so many people who have an inadequate life due to unemployment, hunger, poverty, and others, the degree of welfare in our country is deemed relatively low. This study aims to learn more about the issue of giving direct cash assistance (BLT) and dealing with poverty in Kotaraja Village, Sikur District, East Lombok Regency. This thesis employs qualitative descriptive techniques to gain a holistic understanding of the phenomena of things experienced by research subjects through descriptions of words and language in a unique natural setting and various scientific methods to obtain communication, resources, and bureaucratic disposition structure. The village head, the head of village government affairs, community leaders, four hamlet heads, the head of youth groups, and the community were all interviewed for this study. After the data was collected, the data in this study were analyzed using qualitative descriptive data analysis techniques. The distribution of Cash Direct Assistance (BLT) in Kotaraja Village, Sikur District, East Lombok Regency is not going well in general, according to this study. This can be observed in the socialization that has not been dispersed evenly. Many people are still unaware of the procedures, standards, and criteria for eligibility for the BLT. This program has not performed effectively in terms of oversight. Because there is no cooperation among the many parties, the data gathered is sometimes different from what is observed in the field, causing the program to function incorrectly.

Keywords: Problem, Distribution, Direct Cash Assistance.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


Humaira, W.Pd
NIDN, 0803048601

DAFTAR ISI

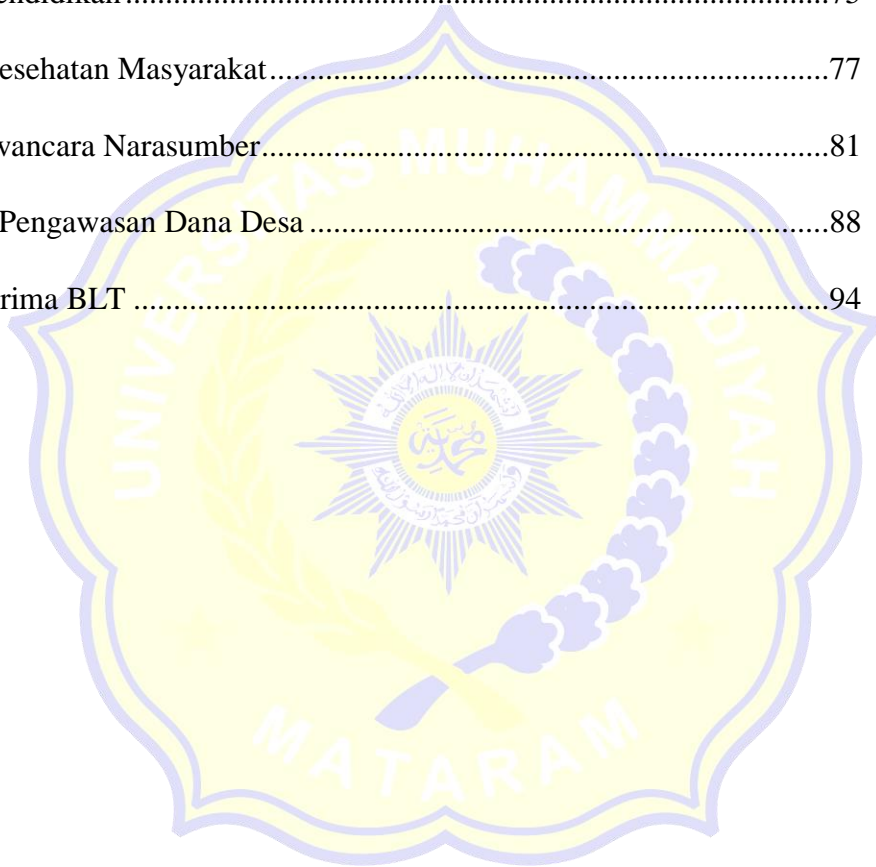
COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan teori	14
2.2.1 Teori Prosedur.....	14
2.2.2 Karakteristik Prosedur	15
2.2.3 Manfaat Prosedur	15
2.2.4 Prosedur Pencatatan	16
2.3 Definisi Masalah.....	16

2.3.1 Bentuk dan Jenis Masalah.....	17
2.4 Definisi Bantuan Langsung Tunai	18
2.4.1 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.....	22
2.4.2 Jenis dan Bentuk BLT.....	22
2.5 Definisi Masyarakat Miskin.....	24
2.5.1 Skema Terbentuknya Kemiskinan.....	27
2.5.2 Bentuk dan Jenis Kemiskinan	30
2.5.3 Indikator-indikator Mengenai Kemiskinan	34
2.5.4 Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi	35
2.5.5 Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Peran Pemerintah	36
2.5.6 Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan	38
2.5.7 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin.....	39
2.5.8 Mengenai Pemekaran Wilayah.....	43
2.6 Kerangka Berpikir.....	44
2.7 Kerangka Teoritik Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	51
3.3 Sumber Data.....	51
3.4 Pemilihan Narasumber.....	54
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.6 Teknik Analisi Data	55
3.7 Subjek dan Objek Penelitian.....	58
3.8 Populasi dan Sampel	58
3.9 Teknik Pengambilan Sampel	58
3.10 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66

4.1.1 Kondisi Geografis Desa Kotaraja	66
4.1.2 Visi dan Misi.....	65
4.1.3 Gambaran Umum Demografis.....	71
4.1.4 Data Tingkat Perkembangan.....	72
4.1.5 Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Kotaraja.....	74
4.1.6 Peta Desa Kotaraja.....	74
4.2 Hasil dan Pembahasan	75
4.2.1 Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur	75
4.2.2 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat miskin pasca menerima program Bantuan Langsung Tunai.....	80
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

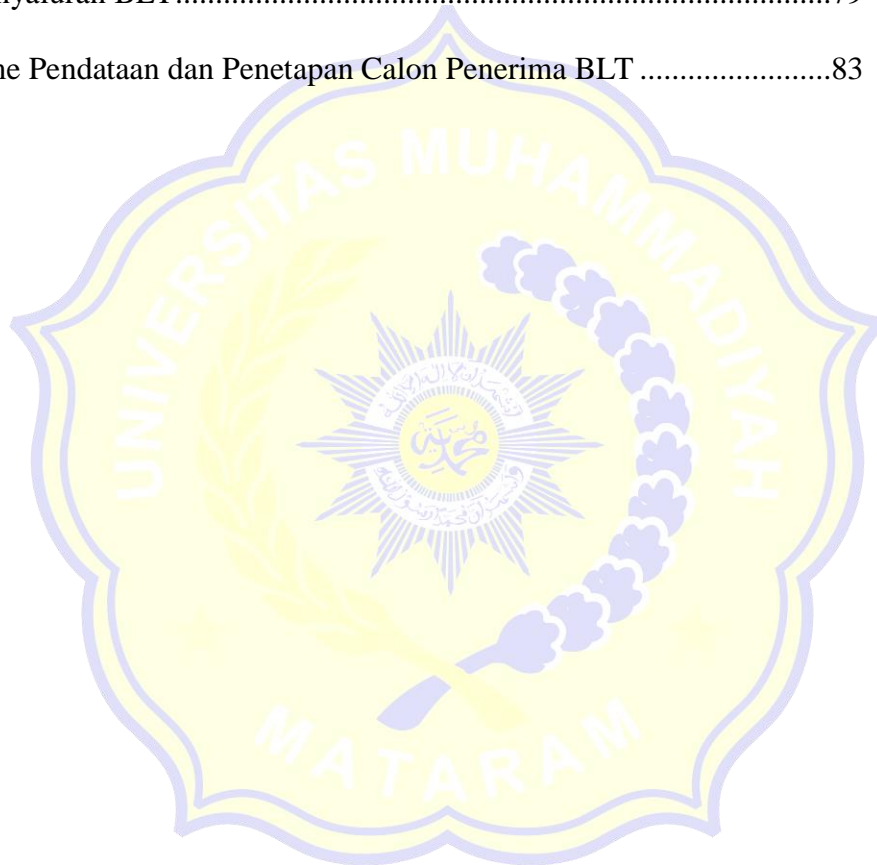
DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	10
4.1 Batas Wilayah Desa	67
4.2 Luas Wilayah	70
4.3 Jumlah Penduduk Tiap Dusun	73
4.4 Tingkat Pendidikan	75
4.5 Tingkat Kesehatan Masyarakat	77
4.6 Hasil Wawancara Narasumber	81
4.7 Prosedur Pengawasan Dana Desa	88
4.8 Data Penerima BLT	94



DAFTAR GAMBAR

2.6 Kerangka Berfikir	44
3.6 Teknik Analisis Data	56
4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	66
4.2 Peta Desa Kotaraja.....	69
4.3 Proses Penyaluran BLT.....	79
4.4 Mekanisme Pendataan dan Penetapan Calon Penerima BLT	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia resmi memberikan subsidi gaji kepada para pekerja secara nasional serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bantuan tunai ini merupakan langkah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu publik menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Subsidi gaji tersebut hampir serupa dengan program yang digulirkan pemerintah pada 2005 lalu yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program yang dikeluarkan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu merupakan respons kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu. Pemerintah Indonesia kemudian memutuskan memotong subsidi minyak yang berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa saat itu. Kedua program serupa tersebut memiliki tujuan utama yang sama, yakni membantu masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hariannya.

Program BLT merupakan ide yang lahir dari Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla usai memenangkan Pemilu 2004 bersama Presiden SBY. Eksekutif, mengacu pada perintah presiden nomor 12 tahun 2005 menggerakkan program BLT tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Target utama dari program pemerintah itu adalah keluarga miskin dengan anak berusia antara 0 sampai 15 tahun, atau ibu yang sedang hamil saat ini. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga pendaftar selama enam tahun. Program ini telah diberikan ke 20 provinsi, 86 daerah dan 739 sub daerah dengan jumlah yang telah berhasil 816.000 keluarga miskin.

Saat itu, target penerima BLT mendapatkan transfer tunai Rp 300 ribu yang dikirim melalui kantor pos. Pembayaran dilakukan secara tiga tahap dimulai pada bulan Oktober dan

tambahan pembayaran sebesar Rp 300 ribu sisannya diberikan pada tahun berikutnya dengan total insentif Rp 1,2 juta per rumah tangga. Program serupa kemudian kembali digerakan tiga tahun berselang berdasarkan Perintah Presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Namun, total nominal yang diberikan kepada masyarakat dipangkas menjadi Rp 900 ribu dan ditutup setelah sembilan bulan. Program BLT dilaksanakan berdasarkan koordinasi lintas sektoral yang bekerja sama berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing lembaga. Penanggung jawab penyaluran dana BLT adalah Departemen sosial yang bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait.

Depsos memiliki kewajiban untuk menyiapkan dana berdasarkan daftar nominatif dan menyampaikan surat perintah kepada PT. Pos Indonesia untuk membayarkan dana BLT. Melalui Kepmensos No. 28/HUK/2008, Menteri Sosial menunjuk PT. Pos Indonesia dan Bank Republik Indonesia sebagai pelaksana penyaluran dana BLT 2008 kepada masyarakat. Mekanisme data penerima BLT saat itu berada ditangan Badan Pusat Statistik (BPS) pusat. Daftar nama dan alamat penerima saat itu disimpan dalam sistem database BPS, Depsos dan PT. Pos Indonesia. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat rumah tangga sasaran dari BPS ke PT. Pos Indonesia secara nasional. Selanjutnya, pengecekan kelayakan daftar rumah tangga sasaran ditingkat desa/kelurahan. Program BLT selanjutnya tidak pernah digulirkan lagi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di tengah pandemi Covid-19, Jokowi memilih memberikan bantuan kombinasi uang tunai plus sembako untuk warga dan subsidi gaji khusus bagi pekerja. (Republika.co.id:2021)

Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di perdesaan yang terdampak situasi Virus Korona (Covid-19). Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan

(PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. Besaran BLT adalah Rp600.000/bulan/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020. BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya. Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat.

Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa. BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. (Humas Kemenkeu/EN:2020)

Penyaluran jaring pengaman sosial yang tidak tepat sasaran ditengarai karena lemahnya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat Kabupaten/Kota. Kasubdit Validasi dan Terminasi Kementerian Sosial (Kemensos) Slamet Santoso mengatakan bahwa pembaruan data kemiskinan disepakati dua tahun sekali yang kemudian diubah Kemensos menjadi tiga bulan sekali. Walhasil, pada masa pandemi Covid-19, ada banyak pergerakan data yakni penambahan atau pengurangan orang miskin yang kemudian berimbas pada carut-marutnya penyaluran jaring pengaman sosial. Menurutnya, ini menjadi tantangan semua pihak

terkait agar masalah ini terselesaikan. Berbagai upaya telah dilakukan Kemensos guna menyalurkan jaring pengaman sosial tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

Kementerian PPN/Bappenas berencana memperbaharui Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) dengan melakukan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini nantinya juga akan berdampak pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tepat sasaran. Untuk itu, Wakil Direktur Analisis Data dan Pemetaan Kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Widaryatmo menyebutkan partisipasi Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembaharuan ini. (Bappenas:2020).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Data Demografi di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok timur berdasarkan BLT masyarakat miskin yang tercatat yang menerima BLT pada tahun 2020 hanya 1302 jiwa per KK atau 98,79%, sedangkan yang tidak tercatat ada 16 jiwa per KK atau 1,21% jadi total yang seharusnya dapat menerima penyaluran BLT tahun 2020 yaitu 1318 jiwa per KK atau 100,00%. Banyaknya kecurangan yang terjadi ditengah maraknya bantuan BLT ini membuat mereka yang seharusnya mendapatkan penyaluran BLT tapi tidak mendapatkan apa-apa atau kecurangan dalam bentuk sistem monarki yang terjadi ditengah masyarakat (data diolah dari desa Kotaraja).

Proses *assessment* (pendataan) BLT Dana Desa yang dilakukan yaitu melalui mekanisme pendataan BLT yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa. Kemudian, hasil pendataan sasaran masyarakat miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. Setelah, dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT DD selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Walikota melalui Camat. Terakhir, program BLT DD segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal terima di Kecamatan.

Pendataan BLT Dana Desa di Desa Kotaraja sudah mengikuti proses *assessment* sesuai dengan mekanisme pendataan BLT. Namun, masalah yang terjadi pertama yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum *terupdate* atau masih awam dalam hal seperti ini karna kebanyakan di desa lebih tau informasi dari mulut ke mulut dan proses mensosialisasikannya pun

masih setengah-setengah. Akibat kondisi tersebut, beberapa dusun di Desa Kotaraja hingga saat ini masih belum menerima BLT-DD.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan kasus problematika penyaluran dana BLT-DD yang terjadi di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Dari alasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat miskin di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur?
- b. Sejauhmana tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pasca menerima program Bantuan Langsung Tunai di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis harapkan dapat dicapai melalui penelitian proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat miskin di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.
2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dalam program BLT Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya agar lebih memantapkan bukti dan juga diharapkan dapat memberi informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya problematika yang terjadi didalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi terjadinya problematika di dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta sebagai bahan atau sumber data bagi peneliti.

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan faktor-faktor yang dominan sebagai penyebab adanya masalah didalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), selain itu masyarakat juga bisa menjadikan peneliti ini sebagai sumber informasi tentang masalah-masalah yang ada didalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, sehingga masyarakat dapat membantu pemerintah dalam meminimalisir terjadinya kecurangan.

3. Manfaat Akademis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak kampus terkait dengan probelamatika penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020.
- b. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini sebagai acuan untuk mahasiswa penelitian selanjutnya.

- c. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini sebagai pengetahuan untuk pihak kampus dan sekaligus refrensi dalam memperkaya bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Selain menggunakan dasar-dasar teori sebagai konsep atau dasar berfikir dan memecahkan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, juga mengacu pada penelitian terdahulu. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang dijadikan bahan penelitian dalam menyusun proposal skripsi :

No	Judul	Tahun	Peneliti	Metode	<i>Critical Point</i>
1.	Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang	2010	Elis Fadillah (Universita Sumatera Utara)	Evaluatif	Hasil perhitungan melalui uji Mann-Whiteney dengan alpha 95% (1,6449) diperoleh bahwa diantara enam aspek yang diuji ternyata 4 aspek H0 ditolak, ini berarti bahwa rumusan hipotesis H1 diterima yaitu ada perbedaan tingkat kesejahteraan antara keluarga miskin penerima BLT dengan keluarga miskin yang tidak menerima bantuan.
2.	Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap masyarakat Miskin Di	2015	Dian Marini (Universitas Negri Riau)	Kuantitatif Inferensial	75 responden yang mendapatkan BLT tersebut ternyata hanya 21 responden yang benar-benar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54 responden yang lain adalah responden yang

	Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak				tidak pantas untuk mendapatkan BLT ini semua di sebabkan karena 54 responden tersebut memiliki jumlah penghasilan yang lebih banyak dari 21 responden.
3.	Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Tanjungpinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang Tahun	2012	Nur Dhillah Haryati (Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang)	Deskriptif Kualitatif	Implementasi Bantuan (BLT) Di Kec. Tanjungpinang Barat Kel. Bukit Cermin Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang diberikan belum merata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut.
4.	Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Kabupaten Sumbawa Pada Saat Pandemic Covid-19	2020	Intan Zubaidah, Maya Nofitasari (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta)	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah juga meluncurkan program penyaluran Penyaluran BLT yang diharapkan mampu memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat yang rentan penyakit selama masa pandemi.
5.	Pola Pengawasan Pemerintah Dalam	2018	Yusuf Kamis (Universitas Nuku Tidore)	Deskriptif Kualitatif	Pola pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan BLT

Penyaluran BLT Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Selatan				di Kel. Gurabati dapat dinilai sudah sangat baik, walaupun dalam pendataannya masih menggunakan data lama. Namun pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab atas program tersebut.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti yang dilakukan oleh Elish Fadillah, Dian Marini, Nur Dhillah Hayati, Intan Zubaidah, Maya Nofitasari dan Yusuf Kamis Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terlihat dari

Lalu penelitian ini memang menggunakan data terbaru yaitu tahun 2020 tapi masih belum bisa berjalan dengan baik proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menggunakan data lama tapi pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab atas program tersebut.

Implementasi kebijakan berkaitan dengan persoalan sekitar usaha melaksanakan program atau kebijakan, mengadministrasikannya, maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dari program atau kebijakan tersebut kepada masyarakat (Suwitri, 2020 : 80). Apakah pelaksanaan program BLT telah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP), karena pada dasarnya SOP merupakan panduan atau petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis bagi unit organisasi pelaksana kegiatan implementasi kebijakan. Sebagai produk hukum, SOP tersebut harus dipatuhi, karena telah menjadi ketentuan formal yang berlaku (yang dianggap sebagai solusi terbaik), sehingga setiap penyimpangannya diberlakukan sebagai pelanggaran. Tahapan pelaksanaan program BLT di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

dimulai dari (1) pelaksanaan sosialisasi, (2) verifikasi data nominasi RTS, (3) pembagian kartu BLT, (4) pencairan dana BLT, dan (5) pembuatan laporan pelaksanaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Prosedur

Prosedur merupakan suatu proses, langkah–langkah atau tahapan–tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen didalam perusahaan. Menurut Mulyadi (2010: 5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang–ulang. Sedangkan menurut Azhar (2010: 195) juga menjelaskan bahwa Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Dari kedua definisi prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. Pada umumnya pekerjaan klerikal terdiri dari penulisan, pemberian kode, perbandingan, penggandaan, pemilihan, perhitungan, dan pembuatan daftar.

2.2.2 Karakteristik Prosedur

Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari prosedur, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.

3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
5. Menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.
6. Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggota organisasi.
7. Mencegah terjadinya penyimpangan.
8. Membantu efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja dari suatu unit organisasi.

2.2.3 Manfaat prosedur

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikanperbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

2.2.4 Prosedur Pencatatan

Menurut Mulyadi (2011; 5) prosedur pencatatan adalah suatu urutan kegiatan kriteria biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih yang dibuat untuk menjamin

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan adalah suatu kegiatan yang berurutan dan melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih yang dibuat untuk menjamin suatu masalah supaya seragam dalam melaksanakan transaksi yang berada dalam suatu perusahaan dan terjadi secara rutin.

2.3 Definisi Masalah

Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. *Problem* menurut KBBI diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”. Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud *problematika* atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

2.3.1 Bentuk dan Jenis Masalah

Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apapun, dimanapun dan kapanpun serta oleh siapapun. Dari pengertian problem diatas, problem atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting, diantaranya:

- a. Negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-alat untuk mencapai tujuan.
- b. Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu masih perlu dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui penilaian. Sebaliknya apabila pilihan atas alternatif pemecahan itu telah ditentukan, misalnya melalui proses pembuatan keputusan analitis maka pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan.

Menurut Suharso, dkk (2011: 391) problematika adalah sesuatu yang mengandung masalah. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya

tujuan. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sedangkan menurut menurut Prajudi Atmosudirjo problematika merupakan sesuatu yang menyimpang dari apa yang telah diharapkan, direncanakan, dan ditentukan untuk dicapai sehingga problematika menjadi rintangan atau tantangan menuju tercapainya sebuah tujuan tersebut.

Kemudian menurut Mustika Zed problematika merupakan sesuatu yang belum ditemukan cara penyelesaiannya atau jawabannya, yang menjadi teka-teki yang menuntut pemecah (penelitian) ilmiah, karena untuk menemukan jawabannya hanya mungkin didapatkan melalui penelitian atau cara kerja ilmiah. Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan. Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

2.4 Definisi Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran. Tujuan dari program bantuan langsung tunai bagi rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah: (1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya, (2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan (3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Kabupaten Kudus dimulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi data daftar nama nominasi RTS, pembagian kartu BLT, pencairan dana BLT, dan terakhir pembuatan laporan pelaksanaan.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

BLT adalah singkatan dari Bantuan Langsung Tunai yang merupakan program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Adapun negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah negara Brasil pada tahun 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia yang diprakarsai oleh Presiden ke-35 Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. Setelahnya, BLT diadopsi negara lainnya dan jumlah pemberian BLT disesuaikan dengan kebijakan pemerintah masing-masing.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menyelenggarakan BLT. Adapun mekanisme di Indonesia berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT saat itu diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia.

Selain itu, tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaan BLT ini, banyak yang menganggap sukses oleh beberapa kalangan, meski demikian kontroversi dan kritik masih berdatangan. Pada penyelenggaraan BLT di Indonesia, banyak kontroversi yang timbul. Ada yang menyebut BLT seperti alat pendongkrak popularitas jelang pemilu, pembodohan bangsa, dan penambah beban dengan hutang. Konflik yang ada pun terus berkembang hingga pernah terjadi demo dan menjadi perdebatan politikus hingga sekarang. (WartaEkonomi.co.id:2020)

Kemenkeu - Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terdampak situasi COVID-19, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. Besaran BLT adalah Rp. 600.000/bulan/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020. BLT dianggarkan dalam APBDDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya.

Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa. BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

2.4.1 BLT Dana Desa

Calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

BLT Dana Desa disalurkan dalam dua gelombang yang masing-masing gelombang terdiri dari tiga tahapan. Gelombang pertama diberikan pada bulan April (tahap I), Mei (tahap II), dan

Juni (tahap III). Sementara itu, gelombang kedua diberikan pada bulan Juli (tahap IV), Agustus (tahap V), dan September (tahap VI). Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000. (Tirto.id-Yunita Debora:2020)

2.4.2 Jenis dan Bentuk BLT

1. Bansos BLT PKH

Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH menjangkau 10 juta Kader Pembangunan Manusia (KPM) dengan total anggaran Rp. 28,71 triliun BLT PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali, dalam 4 tahap yaitu Januari, April, Juli dan Oktober melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN). Pada bulan Januari, PKH akan disalurkan dengan anggaran sebesar Rp7,17 triliun.

Sebagai sebuah program bansos bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

2. Kartu Sembako atau Bansos BNPT Rp.200 Ribu

Target penerima bansos ini adalah 18,8 juta KPM dengan anggaran Rp45,12 triliun untuk Kartu Sembako atau Bansos BNPT Rp200 Ribu. Bansos yang awalnya berbentuk sembako untuk masyarakat di wilayah Jabodetabek itu diubah menjadi BLT, dan Bansos BNPT ini akan diberikan per bulan untuk masa Januari sampai dengan Desember 2021.

3. Bansos Tunai BST 300 Ribu

Target penerima untuk Bansos Tunai sebanyak 10 juta KPM dengan anggaran Rp12 triliun. Pada bulan Januari, Bansos Tunai akan disalurkan anggaran sebesar Rp3 triliun sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan Januari adalah sebesar Rp13,93 triliun.

Selanjutnya, Bansos Tunai senilai Rp300 ribu per bulan per keluarga yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan Kartu Sembako untuk dimanfaatkan pembelian

kebutuhan pokok dan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi Covid-19 yang seluruhnya akan disalurkan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk bisa mendapatkan bansos BST Rp300 ribu ini, NIK KTP calon penerima harus terdaftar di dtks.kemensos.go.id. Jika NIK e-KTP calon penerima terdaftar di link dtks.kemensos.go.id, tandanya akan menjadi penerima BST Rp300 ribu dari Kemensos.

Lebih lanjut, Mensos Risma menerangkan, penyaluran semua jenis Bansos BLT 2021 akan bekerjasama dengan PT POS Indonesia untuk meminimalisir penyelewengan dana bantuan. Peluncuran bantuan tersebut, untuk PKH dan Kartu Sembako dilakukan oleh bank milik negara yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN sedangkan bagi penerima yang sakit, lansia dan penyandang disabilitas berat, bank-bank tersebut akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing. Sementara penyaluran bansos akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia yang akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing keluarga. Selanjutnya guna pemanfaatan yang bijak dan tepat untuk bantuan tersebut, kami memberi arahan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi 'leaflet', sosialisasi, maupun edukasi yang disampaikan oleh petugas bank atau PT Pos.

2.5 Definisi Masyarakat Miskin

Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 2011). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi

tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2010: 122). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini

mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- 1) Kemiskinan (*Proper*) Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.
- 2) Ketidakberdayaan (*Powerless*) Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*) Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.
- 4) Ketergantungan (*dependency*) Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan

dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

- 5) Keterasingan (*Isolation*) Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

2.5.1 Skema Terbentuknya Kemiskinan

Skema terbentuknya kemiskinan yang didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Chambers menerangkan bagaimana kondisi yang disebut miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan bahwa kemiskinan selalu diukur/diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, perumahan atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk mengonsumsi. Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah (Nugroho, 2010: 17).

Konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti.

1. Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyakit menular.
2. Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas sehingga sangat rentan terhadap resiko kematian
3. Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampak mengganggu kesehatan.
4. Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan.

Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah (morbiditas) atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian (mortalitas). Angka mortalitas yang tinggi dan keadaan kesehatan masyarakat yang rendah akan berdampak pada partisipasi sosial yang rendah, ketidakhadiran yang semakin tinggi, kecerdasan yang rendah, dan ketrampilan yang relatif rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing keadaan yang disebabkan oleh adanya mortalitas maupun morbiditas yang tinggi.

1) Tingkat Partisipasi Sosial Yang Rendah

Kondisi kesehatan maupun gizi yang rendah menyebabkan ketahanan fisik atau modal fisik yang diperlukan untuk partisipasi sosial menjadi rendah. Hal ini dikarenakan kesehatan yang terganggu tidak dapat menunjang partisipasi secara penuh baik di lingkungan kemasyarakatan

maupun di lingkungan kerja. Sebagian besar golongan masyarakat miskin relatif jarang terlibat secara aktif dalam aktivitas sosial.

2) Absensi Meningkat

Faktor kualitas kesehatan yang rendah tidak mendukung adanya aspek kehadiran dalam aktivitas kemasyarakatan baik di lingkungan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Akibatnya, ketidakhadiran atau absensi dalam segala aktivitas menjadi semakin meningkat sehingga tidak memiliki kesempatan untuk berperan secara aktif dalam lingkungan sosial tersebut.

3) Tingkat Kecerdasan Yang Rendah

Faktor gizi buruk ataupun kualitas kesehatan yang rendah akan berdampak pada menurunnya kualitas intelektual. Seperti diketahui bahwa kinerja otak manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah memerlukan gizi yang memadai atau ideal. Kekurangan gizi termasuk faktor yang paling utama terhadap adanya penurunan kualitas intelektual.

4) Keterampilan Yang Rendah

Pada prinsipnya, ketrampilan merupakan salah satu bentuk dari adanya kreativitas. Aktivitas ini harus ditunjang dengan kondisi kesehatan yang mencukupi dan tentunya adalah kualitas intelektual yang memadai. Masyarakat yang mengalami kekurangan gizi ataupun rentan terhadap gangguan kesehatan relatif sulit untuk mengembangkan ketrampilannya. Hal ini dikarenakan dukungan kesehatan untuk menunjang pengembangan kreativitas kerja relatif rendah sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas ketrampilannya.

2.5.2 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial

terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhankebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2012):

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan ataumendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerahdaerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya (Jarnasy, 2015: 8-9). Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (developmentalism) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidakmeratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970an dan 1980an (Jarnasy, 2015: 8).

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati, 2011: 123). Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah

3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
4. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*)
5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan di atas tidak memiliki sifat mutlak (absolut) untuk dijadikan kebenaran universal terutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasi atau diukur.

2.5.3 Indikator-indikator Mengenai Kemiskinan

Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan menyertakan pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukur banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan pengukuran lainnya adalah menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi untuk menerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan. Adapun mengenai beberapa indikator-indikator kemiskinan akan diuraikan pada sub sub bab berikut ini.

2.5.4 Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2011: 123). Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan.

1. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya pendapatan per kapita (income per capita) dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun (Todaro, 2019: 437).

2. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (reference population) yang telah ditetapkan (BPS, 2010). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan

mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2011: 123).

2.5.5 Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatu perekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaan penanggulangan permasalahan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial. Program penanggulangan masalah kemiskinan ini dibiayai melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) melalui pos pengeluaran untuk Program Pembangunan. Prinsip yang digunakan untuk program ini bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya manusia dan pemenuhan sarana maupun pra sarana fisik. Kedua bentuk pelaksanaan dalam APBN ini disebut juga investasi pemerintah untuk sumber daya manusia dan investasi pemerintah di bidang fisik. Adapun pos pengeluaran pembangunan untuk investasi sumber daya manusia maupun investasi fisik.

1. Investasi Pemerintah di Bidang Sumber Daya Manusia

Investasi pemerintah di bidang sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang direalisasikan di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesejahteraan, pembinaan wanita dan anak-anak, pengembangan kualitas tenaga kerja, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan agama. Keseluruh aspek di

bidang sumber daya manusia di atas merupakan salah satu syarat dasar dalam program penanggulangan masalah kemiskinan.

2. Investasi Pemerintah di Bidang Fisik

Investasi pemerintah di bidang fisik atau disebut juga investasi fisik pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang secara umum ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan ke dalam pembangunan fisik. Pada APBN, pos pengeluaran untuk investasi fisik pemerintah ini adalah keseluruhan pos pengeluaran pembangunan kecuali untuk bidang investasi sumber daya manusia. Pos pengeluaran pembangunan untuk investasi fisik ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 di atas.

2.5.6 Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan

Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang penyakit menular. Kelompok masyarakat yang disebut miskin juga memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan yang memadai sehingga akan menyebabkan resiko kematian yang tinggi.

Indikator pelayanan air bersih atau air minum merupakan salah satu persyaratan terpenuhinya standar hidup yang ideal di suatu daerah. Ketersediaan air bersih akan mendukung masyarakat untuk mewujudkan standar hidup sehat yang layak. Dalam hal ini, ketersediaan air bersih akan mengurangi resiko terserang penyakit yang diakibatkan kondisi sanitasi air yang buruk.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat keterkaitan/hubungan antara ketersediaan pelayanan air bersih dan jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Pada sisi permasalahan lain, ketersediaan air bersih sangat ditentukan oleh kemampuan pembangunan pra sarana air bersih dalam menjangkau lingkungan atau pemukiman masyarakat. Masyarakat yang kurang terjangkau oleh pelayanan air bersih/minum relatif lebih rendah kualitas kesehatannya dibandingkan masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan air bersih.

2.5.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai terbentuknya kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ataupun sekelompok orang (masyarakat) menjadi miskin. Pemikiran sosial saat ini lebih banyak memfokuskan penyebab kemiskinan pada faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang terdapat di suatu daerah. Faktorfaktor tersebut merupakan dimensi dari kesejahteraan atau kemiskinan yang selanjutnya dijadikan sebagai faktor yang menciptakan besarnya penduduk miskin (Saleh, 2012: 88-89). Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah diterangkan sebagai berikut.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pada prinsipnya, PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup 40 regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan

terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2012). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

3. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2011). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan

semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

4. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA)

Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga (Harahap, 2010). Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

5. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Saleh, 2012). Fasilitas kesehatan sekarang ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan, akan tetapi berperan pula untuk memberikan perbaikan gizi keluarga. Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan atas penyakit atau gangguan medis, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, maka akan semakin tinggi resiko penularan penyakit ataupun gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan ibu dan bayi.

Mengenai daerah pemekaran baru dan keterkaitannya dengan jumlah penduduk miskin dijelaskan sebagai faktor kesejahteraan yang disebabkan adanya perubahan pada pengembangan administrasi wilayah (TMPK, 2011). Daerah pemekaran baru akan mengubah struktur administrasi atas pengaturan wilayah dan jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah lama

dan wilayah pemekaran baru. Ada dua pandangan, terkait dampak dari pemekaran wilayah baru terhadap jumlah penduduk miskin, yaitu (Suwandi, 2014):

1. Perubahan Struktur Kependudukan

Pemekaran wilayah baru akan menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah penduduk yang menempati di masing-masing wilayah tingkat kecamatan. Perubahan pada jumlah penduduk akan berdampak pula pada komposisi jumlah penduduk berdasarkan indikator sosialnya, seperti jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk usia sekolah, jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih, dan jumlah penduduk yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Saleh (2012) menerangkan bahwa konsentrasi kemiskinan di suatu daerah ditentukan pula oleh aspek regional seperti pemusatan jumlah penduduk miskin yang tidak menyebar di suatu daerah (tingkat kecamatan).

2. Perubahan Pada Kebijakan Kesejahteraan

Setiap daerah pemekaran di tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan fasilitas dan kewenangan yang sama dengan daerah lainnya di tingkat kabupaten/kota. Salah satu kewenangan adalah pelimpahan wewenang untuk mengelola kebijakan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan (Suwandi, 2012). Pelimpahan wewenang ini termasuk salah satunya adalah adanya tambahan alokasi dana dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan. Daerah pemekaran baru memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, dibandingkan dengan daerah lain yang tidak mengalami pemekaran.

2.5.8 Mengenai Pemekaran Wilayah

Aspek kemiskinan dalam penelitian ini dikaitkan dengan aspek pemekaran wilayah yang sekaligus menjadi bagian penyelenggaraan otonomi daerah sejak tahun 2001. Berdasarkan

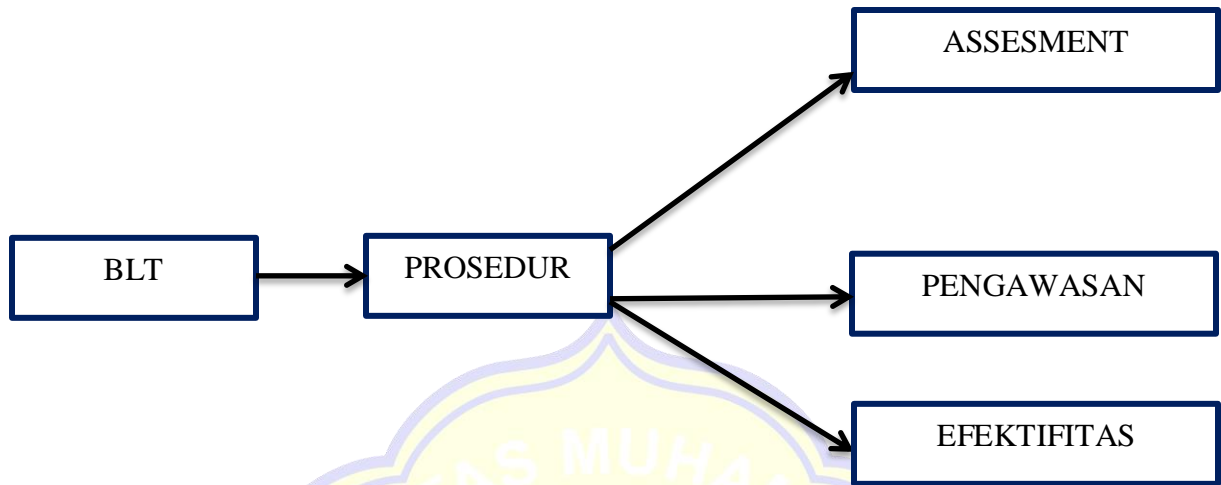
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah administratif baru, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota dari daerah induknya (Kuncoro, 2004). Terkait pelaksanaan otonomi daerah, pemekaran wilayah sebenarnya sudah bisa dilaksanakan terhitung sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Prinsip dalam kemandirian daerah yang difokuskan pada daerah tingkat kabupaten/kota diharapkan akan mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiaya pembangunan di daerah tersebut.

Suwandi (2015) menerangkan bahwa pemekaran wilayah, terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah akan berdampak pada data jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Pembentukan wilayah administrasi baru tersebut akan merubah struktur kependudukan, baik pada aspek jumlah penduduk maupun jumlah penduduk miskin di daerah pemekaran maupun di daerah induknya. Setelah pemekaran wilayah, jumlah penduduk di daerah induk akan berkurang sebesar daerah pemekaran baru. Jika terdapat perubahan pada struktur kependudukan, maka sebagai akibat pemekaran wilayah pun akan berdampak pada perubahan jumlah penduduk miskin, baik pada daerah induk maupun daerah pemekaran baru (Darumurti dan Rauta, 2016).

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Menurut Mujiman (dalam skripsi Diah, 2011:30) menyatakan bahwa kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel teknik dalam rangka memberikan jawaban sementara.

KERANGKA BERFIKIR



2.7 Kerangka Teoritik Penelitian

Dalam memahami permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensional tersebut, perlu dimengerti terlebih dahulu definisi mengenai kemiskinan itu sendiri. Pada awalnya, definisi mengenai kemiskinan lebih banyak mengartikannya sebagai bentuk ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok (Todaro, 2010). Kegagalan konsep pembangunan mendorong pemahaman mengenai kemiskinan terutama di negara-negara sedang berkembang mulai diperluas hingga pada aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dalam hal ini, penyebab kemiskinan memiliki dimensi yang cukup luas meliputi aspek sosial, budaya, politik, lingkungan (alam dan geografis), kesehatan, pendidikan, agama, dan budi pekerti. Bentuk kemiskinan multidimensional inilah yang selanjutnya juga diterangkan sebagai faktor-faktor yang memiskinkan (Suryawati, 2015).

Salah satu konsep atau pemikiran mengenai kemiskinan yang cukup populer adalah konsep dari Chamber (Saleh 2016). Teori kemiskinan dari Chamber ini dilandasi oleh adanya kesenjangan antara bentuk perekonomian perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*) yang selanjutnya menjadikan adanya kesenjangan berupa perbedaan standar hidup/kesejahteraan. Teori Chamber ini kemudian semakin berkembang dengan adanya bentuk pemikiran mengenai kemiskinan di perkotaan (*urban poverty*) dan kemiskinan di pedesaan (*rural poverty*). Kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan memiliki pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu urbanisasi atau perpindahan/migrasi penduduk dari desa menuju ke kota.

Rendahnya taraf kesejahteraan di desa mendorong adanya perpindahan atau migrasi sumberdaya dari desa menuju ke kota (Harahap, 2015). Keterbatasan sektor-sektor formal di perkotaan dalam menyerap sumberdaya ditambah dengan adanya kesenjangan ketrampilan/kemampuan teknis masyarakat dari pedesaan menyebabkan sebagian besar dari penduduk yang bermigrasi tersebut bekerja di sektor informal atau menjadi pengangguran baru di perkotaan. Daya tampung lahan di perkotaan yang relatif terbatas menyebabkan sebagian besar dari mereka lebih banyak menempati kawasan-kawasan yang tidak layak huni. Fenomena kemiskinan seperti ini mulai banyak terlihat ketika konsep pembangunan mulai banyak diterapkan di negara-negara sedang berkembang.

Pada prinsipnya, kemiskinan perkotaan memiliki pemahaman yang sama dengan pemahaman mengenai kemiskinan itu sendiri, yaitu faktor-faktor yang memiskinkan (Suryawati, 2015). Bentuk kemiskinan struktural yang dikembangkan dari pemikiran/teori Chamber ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadikan kemiskinan atau faktor-faktor yang memiskinkan seperti masalah rendahnya taraf pendidikan dan rendahnya kualitas kesehatan yang keseluruhannya menyebabkan kualitas hidup menjadi rendah. Pemerintah juga merupakan salah

satu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah melalui kebijakan/program penanggulangan kemiskinan termasuk pula adanya pelaksanaan proyek fisik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Faktor-faktor penentu tersebut di antaranya terbagi atas faktor makroekonomi, faktor anggaran pemerintah, dan indikator-indikator kesejahteraan. Adapun mengenai hubungannya dengan tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin adalah:

1. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya terutama kebutuhan-kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Tingkat kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan aspek kemampuan pendapatan, akan tetapi juga berkenaan dengan pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah (Todaro, 2010).

2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan (PPP)

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2016). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

3. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2011). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

4. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA)

Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga (Harahap, 2012). Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

5. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Fasilitas Kesehatan (PPK)

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Saleh, 2012). Fasilitas kesehatan sekarang ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan, akan tetapi berperan pula untuk memberikan perbaikan gizi keluarga. Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan atas penyakit atau gangguan medis, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, maka akan semakin

tinggi resiko penularan penyakit ataupun gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan ibu dan bayi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal-hal yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moelong,2011:6). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluatif. Menurut Muhajir (2011:209) dikatakan bahwa penelitian evaluatif adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan dari sebuah kebijakan, pelaksanaan program dari kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program telah tepat sasaran (*feasible*) atau tidak. Dalam penelitian evaluatif diharapkan dapat memberikan keterangan tentang seberapa jauh penyimpangan yang dilakukan obyek dan subyek sebuah penelitian sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam mengarahkan dan membina keberhasilan obyek dan subyek sebuah penelitian. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian *expos facto* yaitu penelitian yang mana data dikumpulkan setelah semua kegiatan dipersoalkan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokasi ini dipilih dengan alasan sebagai berikut :

1. Daerah tersebut merupakan salah satu daerah penerima program BLT-DD sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

2. Di daerah tersebut sebagian masyarakat menengah kebawah menginginkan menerima BLT. Sehingga penelitian ini menarik peneliti untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
3. Desa merupakan tingkatan terkecil agar pelaksanaan BLT dapat diteliti.
4. Karna peneliti pernah KKN di desa yang akan diteliti dan membantu jalannya proses pembagian BLT-DD di desa tersebut.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada Agustus sampai Oktober 2020.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan “purposive sampling” atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000:128). Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa

Wawancara dilakukan kepada kepala desa Kotaraja adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Peran kepala desa terhadap pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum, agama, kesehatan terutama pada ekonomi. Serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat di desa Kotaraja, pemecahan permasalahan dalam masyarakat.

2. Kepala Urusan Pemerintahan Desa

Wawancara dilakukan kepada kepala urusan desa Kotaraja adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung

Tunai (BLT). Serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat di desa Kotaraja, peranan kepala desa dalam peningkatan kinerja perangkat desa Kotaraja dalam memberdayakan masyarakat, pemecahan permasalahan dalam masyarakat.

3. Tokoh-tokoh Masyarakat

Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat desa Kotaraja adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang apa yang mereka rasakan terhadap adanya program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini.

4. Kepala Dusun

Wawancara dilakukan kepada kepala dusun jabon, dayan peken, kedondong di desa Kotaraja adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana proses pengumpulan data untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

5. Ketua Karang Taruna

Wawancara dilakukan kepada ketua karang taruna desa Kotaraja adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

6. Masyarakat

Wawancara dilakukan kepada beberapa masyarakat desa Kotaraja adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Selanjutnya untuk memperoleh informasi secara mendalam serta lebih lengkap dari masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat maka dipergunakan teknik *snowball sampling*. Penentuan jumlah maupun informan penelitian berkembang dan

bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi informan penelitian tidak digambarkan secara rinci namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan.

3.4 Pemilihan Narasumber

Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh penulis (Djarwanto : 2010 : 34).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah :

a. Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan, 2018:72).

Dari pendapat ridwan diatas dapat disimpulkan bahwa metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang berkembang dilapangan sekaligus mengadakan pencatatan secara sistematis agar fenomena dilokasi penelitian tidak ada yang ketinggalan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian

kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan (Djam'an Satori, 2019:47).

Dalam penelitian ini, wawancara struktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penelitian atau pengumpulan data mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dan pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan jawaban alternatif juga sudah disiapkan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah ditunjukkan untuk data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter (Ridwan, 2018:77).

Dengan teknik ini peneliti bisa mendapatkan data-data terkait dengan data-data yang berkaitan dengan kekuatan politik ormas Amphibi.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus mengakibatkan data tunggal. Data yang diperoleh pada umumnya yaitu data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas (Sugiyono, 2013:243). Bahwa melakukan analisis data adalah pekerjaan yang sulit dan memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara lain tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap

peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh penelitian yang berbeda.

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan miles dan humberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013:246-252). Yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori diagram aliran (*flowchart*) dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*verification conclusion drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2010: 345). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Dalam penelitian ini, fenomena utama yang diamati adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat terutama yang berkaitan dengan aspek penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di desa kotaraja kecamatan sikur kabupaten Lombok timur termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengarah pada konteks penelitian ini, adalah mengungkap profesionalitas aparatur pemerintah di lokasi penelitian.

3.7 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penerima BLT di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan objek penelitiannya adalah penyaluran dan pencairan dana BLT, pengawasan BLT oleh pihak terkait, sikap masyarakat terhadap program BLT di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

3.8 Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah kumpulan yang lengkap dari seluruh elemen sejenis, akan tetapi dapat dibedakan sama sekali. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat yang menerima BLT yang berada di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.
2. Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Sudjana,1997:161). Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah sebagian masyarakat penerima BLT di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

3.9 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan adalah *Cluster Random Sampling*. *Cluster Random Sampling* digunakan jika populasi tidak terdiri dari individu-individu melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau *cluster* (Zuriah,2016:136). Penelitian ini dilakukan terhadap populasi penerima BLT di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur untuk itu random tidak dilakukan langsung pada semua BLT, tetapi pada suatu pedukuhan sebagai kelompok atau *cluster*. Dengan begitu maka kesimpulan dari penyidikan *cluster sampling* tidak berlaku atas individu melainkan *cluster-cluster* sebagai keseluruhannya. Cara penentuan sampelnya adalah bahwa kepala keluarga penerima BLT di Desa Kotaraja kemudian peneliti akan menggunakan teknik pengambilan sampel yang kedua yaitu teknik *purposif sampling*. Subjek *purposif sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya (Zuriah,2016:135). Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu, misalnya ada sangkut pautnya dengan masalah yang akan diteliti, menjadi sasaran peneliti, dan ingin diteliti lebih mendalam. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah sebagian kepala keluarga yang menerima BLT di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

3.10 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran

1. Variabel Penelitian

Variabel yang dimaksud adalah sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi obyek pengamatan/faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Adapun variabel yang diteliti adalah :

- a. Ketepatan rekrutmen penerima BLT

- b. Transparan tidaknya penyaluran dan pencairan dana
- c. Pengawasan program BLT
- d. Sikap masyarakat miskin

2. Definisi dan Pengukuran

a. Ketepatan rekrutmen BLT

Ketepatan rekrutmen diartikan sebagai ketepatan dalam proses penyaringan masyarakat yang akan menjadi penerima BLT. Rekrutmen dapat dikatakan tepat jika memenuhi sebagian besar syarat sebagai berikut :

- 1) Memenuhi proses rekrutmen yang benar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan BLT
 - a. BPS kecamatan melengkapi data rumah tangga miskin berdasarkan pada data rumah tangga miskin yang ada di BKKBN. Sensus kemiskinan BPS Daerah dan data kemiskinan dari Pemerintah Daerah.
 - b. Pencacah kecamatan mengisi formulir pendataan sosial ekonomi
 - c. Pencacah kecamatan dan desa melakukan verifikasi lapangan dengan observasi kasat mata dengan tujuan menentukan layak atau tidaknya menjadi penerima BLT.
 - d. Pencacah melakukan wawancara dengan rumah tangga miskin yang telah dicatat.
- 2) Penerima BLT benar-benar warga miskin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pola Kesehatan dan makan
- 3) Tidak memiliki fasilitas buang air besar / Bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 4) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
- 5) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ minyak tanah
- 6) Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu

- 7) Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari
- 8) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau poliklinik
- 9) Luas rumah keluarga kurang dari 8 m/perkapita
- 10) Tinggal dirumah berlantai tanah
- 11) Tingkat kesejahteraan

- a. Menggunakan sumber energi listrik untuk penerangan
- b. Hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- c. Pernah menjadi korban kejahatan selama 5 tahun terakhir

12) Sektor Pekerjaan

- a. Keluarga bekerja di sektor pertanian dengan luas 0,5 ha
- b. Keluarga bekerja di sektor jasa (buruh, tani, bangunan dan nelayan)
- c. Keluarga mengandalkan kiriman uang dari saudara / anaknya
- d. Akses terhadap Lembaga Keuangan
- e. Tidak memiliki tabungan di bank
- f. Harus menjual *asset* untuk melunasi hutang

13) Tingkat Pendidikan

- a. Kepala keluarga tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD
- b. Pendidikan pasangan tidak tamat SD atau tidak sekolah atau hanya SD

14) Kepemilikan Aset

- a. Tidak memiliki sepeda motor (kredit atau non kredit)
- b. Kepemilikan emas maksimal 10 gram
- c. Tidak memiliki kapal motor
- d. Tidak memiliki ternak dalam jumlah besar

b. Transparan tidaknya penyaluran dan pencairan dana

Transparansi penyaluran diartikan sebagai penyaluran Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) yang tepat dengan informasi yang jelas dan tidak ditutup-tutupi. Sedangkan transparansi penyaluran dana diartikan sebagai kejelasan dan ketepatan prosedur pencairan dana. Penyaluran KKB dapat dikatakan transparan jika :

- 1) Mekanisme pendistribusian KKB dari tingkat pusat ke kabupaten berlangsung sesuai prosedur yaitu dari pusat ke camat kemudian kepala desa dan terakhir kepada pencacah untuk diberikan ke penerima BLT
- 2) Ada pengumuman tentang penjelasan mengenai prosedur dan kegunaan KKB
- 3) Ada pemerintahan secara terbuka mengenai siapa saja yang bertugas menangani BLT sehingga masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya mengenai program BLT.

Ketepatan pencairan dana dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Petugas mencairkan dana BLT sesuai dengan jadwal yang ditentukan
2. Dana yang dicairkan sesuai dengan ketentuan yaitu Rp. 300.000,- tanpa potongan apapun.
3. Pencairan dana dilakukan oleh pihak Kantor Pos yang ditunjuk.

c. Pengawasan Program BLT

Diartikan sebagai pengawasan terhadap rekrutmen, pembagian KKB, Penyaluran dan pencairan dana. Pengawasan dikatakan baik jika :

- 1) Petugas pengawas hadir dan aktif dalam melaksanakan BLT
- 2) Pengawasan terhadap program BLT dilakukan oleh pihak netral sehingga tidak memihak kepentingan salah satu golongan.